



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

RENCANA KERJA 2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat karuniaNya kami dapat menyelesaikan tugas yang cukup berat dan menuliskan hasilnya dalam bentuk buku, yang berjudul :

**"RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
KUTAI TIMUR"**

meskipun dalam penyajian yang sangat sederhana.

Rencana Kerja ini secara garis besarnya mengupas tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kabupaten Kutai Timur, selain itu juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan harapan dapat dijadikan acuan tugas dan fungsi pegawai BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kabupaten Kutai Timur, yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dengan segala keterbatasan, Rencana Kerja ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, yang tidak mungkin kami sebutkan semuanya disini. Terima kasih yang tak terhingga sudah sepatutnya kami ucapkan kepada Bapak Bupati Kutai Timur, yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada kami untuk memimpin BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kabupaten Kutai Timur.

Diharapkan RENJA Badan kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi aparatur BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kabupaten Kutai Timur dalam mengemban dan melaksanakan tugas fungsinya masing-masing.

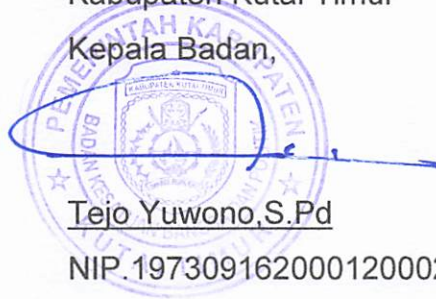
Untuk lebih sempurnanya hasil dari pelaksanaan RENJA ini, kami mengharapkan adanya masukan/bantuan /partisipasi dari semua pihak yang bersifat konstruktif demi keberhasilan dari program-program yang telah dicanangkan.

Sangatta, 2025

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Kutai Timur

Kepala Badan,



Tejo Yuwono, S.Pd

NIP.197309162000120002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	6
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu	6
B. Analisis Kinerja Pelayanan PD	18
C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas PD	20
D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	22
A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	22
B. Tujuan dan Sasaran Renja PD	24
C. Program dan Kegiatan	25
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	28
A. Rumusan Perencanaan Pendanaan	28
B. Rencana Kerja Perangkat Daerah	39
BAB V PENUTUP	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah diharuskan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah hal ini bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Sementara itu, dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah juga perlu berpedoman kepada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 juga mengacu kepada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026. Selain itu, dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 juga mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan berdasarkan 50 Program Unggulan Kutai Timur Hebat 2025-2029. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kutai Timur yang dijabarkan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, proses penyusunan Renja-PD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu:

1. **Persiapan Penyusunan Renja-PD**

Melalui tahapan ini persiapan meliputi pembentukan tim penyusun Renja-PD, orientasi mengenai Renja-PD, penyusunan agenda kerja Tim dan penyiapan data dan informasi.

2. **Penyusunan Rancangan Renja-PD.**

Pada tahapan ini penyusunan rancangan diawali dengan penyusunan rancangan awal Renja-PD yang mencakup analisis gambaran pelayanan perangkat daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Ranwal Renja-PD dilanjutkan dengan tahap penyempurnaan menjadi dokumen Renja-PD yang definitif.

3. **Penetapan Renja-PD.**

Tahapan ini dimana penetapan rancangan akhir Renja-PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, yang dilanjutkan dengan penetapan Renja-PD oleh Kepala Daerah sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berkenaan. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026

memuat berbagai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Program dan kegiatan harus mengarah pada pencapaian target dalam indikator kinerja utama;
- b. Program dan kegiatan harus mengarah pada pencapaian target dalam indikator kinerja renstra;
- c. Program dan kegiatan harus mendukung Visi, Misi Bupati Kutai Timur.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi

- Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
 7. Peraturan Daerah No 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2045.
 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029.
 9. Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026.
 10. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 99 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan menjadi acuan bagi penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur dalam mencapai tujuan organisasi sesuai dengan Visi, Misi dan Arah Kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur antara lain:

1. Menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil / kinerja.
3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.
4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan dan akuntabel.
5. Sebagai alat pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan Sasaran Renja Bakesbangpol
- C. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur adalah penjabaran perencanaan tahunan dan memanfaatkan data kinerja Rencana Strategis pada tahun yang bersangkutan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Renja Bakesbangpol ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan, program dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bakesbangpol selama tahun 2023.

Pada tahun 2023 Anggaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur mencapai Rp. 51.242.461.271,- untuk pelaksanaan 1 (satu) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) Sub Kegiatan. Dari jumlah dana tersebut realisasi keuangan mencapai Rp. 48.139.855.065,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 98,20% dan capaian kinerja keuangan sebesar 93.94%.

Sementara pada Tahun Anggaran 2024, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Bappeda Tahun 2024 alokasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp. 101.288.691.714,- untuk pelaksanaan 1 penunjang urusan pemerintahan, 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut realisasi keuangan mencapai Rp. 96.426.121.288,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 95,26% dan capaian kinerja keuangan sebesar 95.20%.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu siklus perencanaan pembangunan perangkat daerah yang diawali dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi hasil. Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah dilakukan setiap

triwulan berdasarkan data realisasi kinerja dan anggaran tahun berjalan. Kepala perangkat daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan, untuk selanjutnya dilakukan evaluasi. Bila berdasarkan hasil evaluasi oleh Bappeda ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, maka Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

Memasuki tahun akhir pelaksanaan renstra perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 – 2026, dilakukan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 (tahun keempat). Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan renja perangkat daerah dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah, serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah. Tujuan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu “Terwujudnya kesadaran, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI”. Tujuan tersebut dijabarkan kembali ke dalam lima sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesadaran, pemahaman, pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi
3. Meningkatnya peran serta ormas dalam pembangunan
4. Meningkatnya ketahanan ekonomi, agama dan pencegahan Narkotika.
5. Meningkatnya stabilitas daerah yang kondusif dalam rangka mendukung terciptanya ketahanan nasional.

Kelima sasaran dimaksud, dapat dicapai oleh 6 (enam) program, 12 (Dua Belas) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan pada tahun 2024. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur tahun lalu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari

permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya. Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu

- 1.) Kebijakan perencanaan program dan kegiatan,
- 2.) Pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan
- 3.) Hasil rencana program dan kegiatan.

Adapun hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dapat disajikan dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD sampai dengan Tahun 2024
Kabupaten Kutai Timur

Nama PD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8.01.001	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Badan Kesbangpol	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300	3
8.01.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100	5 Dokumen	14	2,8
8.01.001.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100			
8.01.001.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100			
8.01.001.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100			
8.01.001.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100			
8.01.001.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100			
8.01.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	1 Laporan	5	5
8.01.001.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		35 Orang / bulan	39 Orang / bulan	39 Orang / bulan	100			

RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.001.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		32 Dokumen	23 Dokumen	23 Dokumen	100			
8.01.001.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100			
8.01.001.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100			
8.01.001.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	1 Dokumen	4	4
8.01.001.2.03.001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			2 Dokumen	2 Dokumen	100			
8.01.001.2.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100			
8.01.001.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	1 Laporan	4	4
8.01.001.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 Paket	5 Paket	5 Paket	100			
8.01.001.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			20 Orang	20 Orang	100			
8.01.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	3 Laporan	8	3
8.01.001.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	4 Paket	4 Paket	100			
8.01.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	4 Paket	4 Paket	100			
8.01.001.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		46 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100			
8.01.001.2.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		12 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100			

RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.001.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3	3
8.01.001.2.07.009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit						
8.01.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	12 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	100	1 Laporan	37	37
8.01.001.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100			
8.01.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100			
8.01.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	56 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	58	58
8.01.001.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		25 Unit	25 Unit	25 Unit	100			
8.01.001.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		30 Unit	56 Unit	56 Unit	100			
8.01.001.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	1 Unit	1 Unit	100			
8.01.002	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Sekolah dan Forum yang mendapatkan Pembinaan Karakter dan Penguatan Wawasan Kebangsaan (Revolusi Mental, FPK, dan PPKW)	87,14 %	76 %	75,83 %	100 %	131,873929	74,3 %	250,28	2,87
8.01.002.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3	3

RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.002.2.01.001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	100			
8.01.002.2.01.002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
8.01.002.2.01.003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		130 Orang	1100 Orang	1150 Orang	105			
8.01.002.2.01.004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		19 Orang	1125 Orang	1150 Orang	102			
8.01.002.2.01.005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			225 Laporan	18 Laporan	8			
8.01.002.2.01.006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara			200 Keluarga	200 Keluarga	100			
8.01.002.2.01.007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka			1 Dokumen	1 Dokumen	100			
8.01.002.2.01.008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka			200 Orang	200 Orang	100			

RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.002.2.01.009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila			1 Dokumen	1 Dokumen	100			
8.01.002.2.01.011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila			40 Orang	40 Orang	100			
8.01.003	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pembinaan pendidikan politik di wilayah Kutai Timur	60 %	43 %	65 %	72 %	111	60 %	175	2,92
8.01.003.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan	11 Dokumen	2 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	100	11 Dokumen	28	2,545454545
8.01.003.2.01.001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	100			
8.01.003.2.01.002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		12 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	100			
8.01.003.2.01.003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			5200 Orang	5000 Orang				

RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.003.2.01.004	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Daerah		2800 Orang	2800 Orang	2800 Orang	100			
8.01.003.2.01.005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			2 Laporn	2 Laporan	100			
8.01.004	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah LSM yang Aktif	299 LSM	106 LSM	169 LSM	255 LSM	150,89	280 LSM	641	2
8.01.004.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3	3
8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	100			
8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun			226 Dokumen	164 Dokumen	73			

RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			350 Orang	350 Orang	100			
8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			50 Orang	50 Orang	100			
8.01.004.2.01.005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		1 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100			
8.01.005	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Cakupan Pembinaan Urusan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	100 %	40 %	60 %	60 %	100	100 %	200	2
8.01.005.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3	3
8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	100			
8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	100			

RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			1000 Orang	1000 Orang	100			
8.01.005.2.01.004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		75 Orang	50 Orang	50 Orang	100			
8.01.005.2.01.005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		1 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100			
8.01.006	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Konflik Sara Cakupan penanganan konflik sosial di wilayah Kutai Timur	0 Kasus 100 %	0 Kasus 100 %	0 Kasus 100 %	0 Kasus 100 %	0 100	0 Kasus 100 %	0 300	0 3
8.01.006.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3	3
8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun			4 Dokumen	4 Dokumen				

RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.006.2.01.002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			500 Orang	500 Orang				
8.01.006.2.01.004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik		30 Orang	50 Orang	50 Orang	100			
8.01.006.2.01.005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik		2 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100			
8.01.006.2.01.006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100			

B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu tahapan dalam proses pembangunan. Perencanaan akan menghasilkan rencana yang selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu pembangunan, oleh karena itu dalam menyusun perencanaan pembangunan hendaknya diperhatikan indikator kinerja kunci dan berbagai faktor yang kemungkinan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan. Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja.

Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaian kinerjanya dengan menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil / keluaran dari program / kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan / program / kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas. Pencapaian kinerja, sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran setiap misi perangkat daerah.

Hasil analisis pencapaian kinerja perangkat daerah dapat di lihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kutai Timur

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
1	Cakupan Sekolah dan Forum yang mendapatkan Pembinaan Karakter dan Penguatan Wawasan Kebangsaan (Revolusi Mental, FPK, dan PPWK)			75.50%	75.83%	77.83%	97.83%	76%	100%	100%	100%	
2	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pembinaan pendidikan politik di wilayah Kutai Timur			43%	65%	75%	86%	43%	72%	75%	86%	
3	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif			169	199	229	259	106	255	229	259	
4	Cakupan Forum dan UKM yang mendapatkan pendidikan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (FKUB,P4GN)			40%	60%	80%	100%	40%	60.28%	80%	100%	
5	Jumlah Konflik Sara			0	0	0	0	0	0	0	0	
	Cakupan penanganan konflik sosial di wilayah Kutai Timur			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai :

Sejak era reformasi, kehidupan demokrasi, kehidupan politik nasional mengalami kemajuan. Kebebasan dan keterbukaan dalam menyampaikan pendapat, menjadi hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat. Hal seperti ini satu sisi menjadi hal yang merupakan kemajuan, namun disatu sisi juga merupakan menjadi hal yang perlu disikapi, karena hal tersebut telah merubah pola kehidupan masyarakat. Masyarakat sering bertindak individualistis dan berkelompok. Masyarakat telah mengadopsi budaya baru yang belum sepenuhnya dipahami serta diyakini kebenaran dan kesesuaian dengan karakter bangsa. Nilai-nilai luhur bangsa dianggap sudah tidak relevan dengan kehidupan di era sekarang.

Dampak demokratisasi tidak didasari dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila telah memunculkan sikap individualistis yang jauh berbeda dengan nilai-nilai Pancasila. Hal seperti ini terlihat pada kebebasan masyarakat dalam berdemokrasi dalam menyelesaikan masalah bangsa. Pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur pancasila dewasa ini juga dinilai telah memudar utamanya di kalangan generasi muda. Wawasan kebangsaan menjadi hal yang abstrak dan jauh dari pemahanan di kalangan generasi muda. Demokrasi yang berlebihan dan memudarnya pemahaman wawasan kebangsaan di masyarakat menjadi masalah yang krusial bagi pemerintah saat ini, disamping majunya pembangunan nasional yang bisa menimbulkan gejala sosial di masyarakat. Pro kontra yang terjadi akibat pembangunan infrastruktur di masyarakat juga harus disikapi oleh pemerintah.

Sesuai dengan uraian diatas maka dirumuskan isu-isu yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan kinerja SKPD antara lain sebagai berikut :

- a. Adanya Aspirasi atau harapan masyarakat yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah yang akan memicu terjadinya konflik dan gejolak di masyarakat yang bisa mengganggu stabilitas daerah.
- b. Munculnya isu paham radikalisme di kalangan masyarakat, sehingga kita harus meningkatkan lagi pemahaman terhadap Pancasila, UUD 1945, Wawasan Kebangsaan dan semangat bela negara.

c. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam berorganisasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yg berlaku.

d. Masih tingginya tingkat penyalaggunaan narkoba di Kabupaten Kutai Timur

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

Tantangan

1. Rendahnya pemahaman akan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai luhur budaya bangsa di kalangan masyarakat khususnya anak remaja.
2. Potensi kerawanan sosial di masyarakat baik yang kontra maupun yang pro terhadap kebijakan pemerintah daerah.
3. Potensi penyebaran paham-paham radikalisme yang menjadi akar timbulnya terorisme.

Peluang Pengembangan :

1. Ketersediaan media informasi
2. Sinergitas pemangku kepentingan melalui forum komunikasi diskusi politik

Guna menjawab tantangan dan permasalahan seperti tersebut diatas, perlu diciptakan masyarakat yang aman, tenteram serta memiliki rasa kebangsaan yang tinggi. Diperlukannya peningkatan wawasan kebangsaan pada masyarakat, sehingga akan mendukung stabilitas keamanan.

D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan dokumen RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026, secara umum telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini terlihat dari rumusan program dan kegiatan dalam rancangan awal RKPD sudah selaras dan anggarannya telah sesuai dengan kebutuhan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, dalam upaya untuk mewujudkannya diperlukan dasar-dasar transformasi yang kuat. Sebagai strategi dalam pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Dalam RPJMN 2025-2045 mengusung beberapa misi Presiden yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2045. Prioritas Nasional merupakan goals periode jangka menengah tahun 2025-2029. Misi Presiden yang disebut sebagai Asta Cita dan dituangkan menjadi Prioritas Nasional tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender,

- serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan Misi / Program Prioritas, Sasaran Utama Pembangunan Nasional dan Proyek Prioritas dalam RPJMN 2025-2029 diatas dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu mendukung penguatan kualitas politik dan demokrasi Indonesia serata implementasi nilai-nilai Ideologi Pancasila melalui dukungan terhadap misi/prioritas nasional ke-1 Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), ke-7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, dan ke-8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

perencanaan pembangunan anatara Pusat dan Daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bakesbangpol

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 tidak terlepas dari pencapaian visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG DAMAI, TENTRAM DEMOKRATIS DAN BERWAWASAN KEBANGSAAN”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut telah dirumuskan dalam 4 misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan sistem demokrasi yang kondusif di wilayah Kabupaten Kutai Timur.
2. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang berwawasan kebangsaan.
3. Mewujudkan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat dalam menopang stabilitas nasional.
4. Mewujudkan kondusifitas daerah dengan mensinergikan peran-peran masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik, dengan indikator Indeks Pelayanan Publik.

Sasaran : Meningkatnya kewaspadaan terhadap ancaman keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat, dengan indikator Indeks Kerawanan Sosial.

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur menetapkan indikator kinerja program sebagai berikut :

1. Jumlah Konflik sosial
2. Persentase Penanganan Konflik sosial di wilayah Kutai Timur
3. Persentase ASN dan Forum yang mendapat pembinaan ketahanan ekonomi, sosail,Budaya dan Agama yang bersih dari Narkoba.
4. Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif

5. Persentase sekolah dan forum yang mendapatkan pembinaan, penguatan Ideologi Pancasila, Karakter Kebangsaan dan Bela Negara;
6. Persentase pembinaan Pendidikan politik diwilayah Kutai Timur.

C. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran perencanaan tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan pada setiap akhir tahun anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengimplementasikannya dapat dirumuskan dalam program kerja tahun 2026, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur merencanakan akan melaksanakan 1 satu unsur penunjang urusan pemerintahan Kabupaten/Kota, 4 (empat) Program, 8 (delapan) Kegiatan, dan 20 (du puluh) Sub Kegiatan, sebagaimana diuraikan berikut:

Uraian program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan;

❖ Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

❖ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

❖ Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

❖ **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, *dengan Sub Kegiatan :***

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, *dengan Kegiatan :*

❖ **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, *dengan sub kegiatan :***

- Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
- Pembentukan Paskibraka
- Pelaksanaan Tugas Purna Paskibraka Duta Pancasila
- Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Pengembangan Etika serta Budaya Politik., *dengan kegiatan :*

❖ **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, *dengan sub kegiatan:***

- Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, *dengan kegiatan :*

❖ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, *dengan sub kegiatan :*

- Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial, *dengan kegiatan :*

❖ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, *dengan sub kegiatan :*

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

A. Rumusan Perencanaan Pendanaan

Suatu program dan kegiatan tentunya memerlukan pendanaan yang berkesinambungan dan terukur, agar setiap program dan kegiatan yang direncanakan sebelumnya dapat berjalan sesuai target yang diharapkan. Namun pendanaan tersebut tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Rumusan perencanaan keuangan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 sebesar **Rp.21.669.672.599,- (Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)**. Secara garis besar dapat diuraikan dalam table berikut :

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			21.669.672.599				22.765.144.275
8 01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			21.669.672.599				22.765.144.275
8 01 01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	81,30	7.450.355.210				7.651.311.439
			IP ASN	82					
8 01 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	6 Dokumen	250.000.000	APBD		5 Dokumen	250.000.000
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan					
8 01 01 2.01 0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	6 Dokumen	150.000.000			6 Dokumen	150.000.000
8 01 01 2.01 0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	100.000.000			1 Dokumen	100.000.000
8 01 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang / Bulan	5.287.228.634	APBD		1 Laporan	5.376.311.439
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen					
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan					
8 01 01 2.02 0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang / Bulan	4.987.228.634			65 Orang / Bulan	5.076.311.439
8 01 01 2.02 0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	200.000.000			4 Dokumen	200.000.000
8 01 01 2.02 0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	100.000.000			2 Laporan	100.000.000
8 01 01 2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	90.000.000	APBD			35.000.000

RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8 01 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		2 Laporan	90.000.000				35.000.000
8 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kutai Timur	66 Unit	175.000.000	APBD			100.000.000
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		66 Unit					
8 01 01 2.05 0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		66 Unit	75.000.000				50.000.000
8 01 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		66 Unit	100.000.000				50.000.000
8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kutai Timur	2 Paket	910.000.000	APBD			800.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		35 Laporan					
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		4 Dokumen					
8 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Paket	150.000.000				100.000.000
8 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		35 Laporan	660.000.000				600.000.000
8 01 01 2.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		4 Dokumen	100.000.000				100.000.000
8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kutai Timur	1 Unit	180.905.376	APBD			350.000.000
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2 Unit					
8 01 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit	128.000.000				200.000.000
8 01 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2 Unit	52.905.376				150.000.000
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kutai Timur	12 Laporan	306.960.000	APBD			290.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan					
8 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	186.960.000				190.000.000
8 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	120.000.000				100.000.000

RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kutai Timur	29 Unit	250.261.200	APBD			450.000.000
		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		38 Unit					
8 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		29 Unit	150.000.000				150.000.000
8 01 01 2.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		38 Unit	100.261.200				300.000.000
8 01 02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase sekolah dan Forum yang mendapatkan pembinaan penguatan ideologi Pancasila, Karakter Kebangsaan dan Bela Negara		40.40%	5.665.734.337				5.901.087.248
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Kutai Timur	1 Dokumen	5.665.734.337	APBD			5.901.087.248
		Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		1 Dokumen					
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		500 Orang					
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		30 Orang					
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		3 Laporan					
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		750 Keluarga					
		Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka		2 Dokumen					
		Jumlah Paskibraka		350 Orang					
		Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila		1 Dokumen					

RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila		1 Dokumen					
		Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila		40 Orang					
8 01 02 2.01 0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		1 Dokumen	100.000.000				100.000.000
8 01 02 2.01 0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		1 Dokumen	150.000.000				150.000.000
8 01 02 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		500 Orang	150.000.000				150.000.000
8 01 02 2.01 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		30 Orang	150.000.000				150.000.000
8 01 02 2.01 0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		3 Laporan	200.000.000				200.000.000
8 01 02 2.01 0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		750 Keluarga	200.000.000				200.000.000
8 01 02 2.01 0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka		2 Dokumen	300.000.000				300.000.000
8 01 02 2.01 0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka		350 Orang	4.115.734.337				4.151.087.248
8 01 02 2.01 0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila		1 Dokumen	100.000.000				150.000.000
8 01 02 2.01 0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila		1 Dokumen	100.000.000				200.000.000
8 01 02 2.01 0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila		40 Orang	100.000.000				150.000.000

RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8 01 03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Pengembangan Etika serta Budaya Politik.	Persentase pembinaan pendidikan politik di wilayah Kutai Timur		28%	2.348.208.693				2.445.752.580
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Kutai Timur	1 Dokumen	2.348.208.693	APBD			2.445.752.580
		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun		11 Dokumen					
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		100 Orang					
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		100 Orang					
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		1 Laporan					
8 01 03 2.01 0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun		1 Dokumen	50.000.000				50.000.000

RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8 01 03 2.01 0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun		11 Dokumen	1.294.648.601				1.695.752.580
8 01 03 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		100 Orang	100.000.000				300.000.000
8 01 03 2.01 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		100 Orang	503.560.092				200.000.000
8 01 03 2.01 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		1 Laporan	400.000.000				200.000.000
8 01 04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif		30%	1.324.617.596				1.558.871.965
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Kutai Timur	1 Dokumen	1.324.617.596	APBD			1.558.871.965
		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun		1 Dokumen					
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		300 Orang					

RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		50 Orang					
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		1 Laporan					
8 01 04 2.01 0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun		1 Dokumen	150.000.000				150.000.000
8 01 04 2.01 0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun		1 Dokumen	150.000.000				200.000.000
8 01 04 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		300 Orang	574.617.596				658.871.965
8 01 04 2.01 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		50 Orang	250.000.000				300.000.000
8 01 04 2.01 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		1 Laporan	200.000.000				250.000.000
8 01 05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase ASN dan Forum yang mendapatkan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang bersih dari narkoba		27%	1.878.424.889				1.956.454.097
		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun		1 Dokumen					
		Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun		1 Dokumen					

RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kutai Timur	4.000 Orang	1.878.424.889	APBD			1.956.454.097
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		60 Orang					
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		1 Laporan					
8 01 05 2.01 0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun		1 Dokumen	100.000.000				100.000.000
8 01 05 2.01 0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun		1 Dokumen	200.000.000				200.000.000
8 01 05 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		4.000 Orang	1.078.424.889				1.156.454.097
8 01 05 2.01 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		60 Orang	300.000.000				300.000.000
8 01 05 2.01 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		1 Laporan	200.000.000				200.000.000

RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8 01 06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Konflik Sosial		0 Kasus	3.002.331.874				3.251.666.946
		Persentase penanganan konflik sosial		100%					
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Kutai Timur	2 Dokumen	3.002.331.874	APBD			3.251.666.946
		Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun		1 Dokumen					
		Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		250 Orang					
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		30 Orang					
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		2 Laporan					
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		2 Dokumen					
8 01 06 2.01 0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun		2 Dokumen	200.000.000				200.000.000

RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8 01 06 2.01 0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun		1 Dokumen	200.000.000				200.000.000
8 01 06 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		250 Orang	502.331.874				551.666.946
8 01 06 2.01 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		30 Orang	300.000.000				300.000.000
8 01 06 2.01 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		2 Laporan	300.000.000				500.000.000
8 01 06 2.01 0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		2 Dokumen	1.500.000.000				1.500.000.000

B. Rencana Kerja Perangkat Daerah

Sesuai tujuan dan sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2026, Rancangan Awal Rencana Kerja dan Pendanaan tahun Bappeda Tahun 2025 disusun berdasarkan :

- a. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026;
- b. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029;
- c. Kepmendagri nomor: 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. KUTAI TIMUR
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						16.430.890.113,00							30.547.905.691,00	
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						16.430.890.113,00							30.547.905.691,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						16.430.890.113,00							30.547.905.691,00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	-			100 %	7.450.108.113,00						-	12.997.905.691,00	
		[TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH]	Indeks Profesionalisme ASN Nilai SAKIP	76.50 84	67.65 79	67.65 80	70.50 80	7.450.108.113,00	-	-	-	-	-	-	12.997.905.691,00	-
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia	-			5 Dokumen	75.000.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	ASN dan Pemangku Kebijakan	-	300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	ASN dan Pemangku Kebijakan		200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	ASN dan Pemangku Kebijakan		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Dokumen	6.897.108.113,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	ASN dan Pemangku Kebijakan	-	11.450.905.691,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				66 Orang/bulan	6.798.108.113,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	ASN dan Pemangku Kebijakan		10.950.905.691,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	71.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	ASN dan Pemangku Kebijakan		300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	28.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	ASN dan Pemangku Kebijakan		200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			2 Dokumen	52.240.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	-	-	800.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	33.658.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	-		140.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	18.582.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	-		660.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			1 Dokumen	425.760.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	-	-	447.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	246.120.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	-		220.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	179.640.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	-		227.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase sekolah, Sekolah Tinggi dan Forum yang mendapatkan penguatan Ideologi Pancasila, Karakter Kebangsaan dan Bela Negara	-			2,45 %	5.000.000.000,00						-	8.050.000.000,00	
		[MENINGKATNYA KESADARAN MSYARAKAT AKAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN]	Persentase sekolah dan Forum yang mendapatkan pembinaan penguatan ideologi Pancasila, Karakter Kebangsaan dan Bela Negara	100	100	20,53	40,40	5.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-	8.050.000.000,00	-

RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-			1 Dokumen	5.000.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	-	8.050.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0002		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0006		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				350 Keluarga	250.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka														
			Jumlah Paskibraka				200 Orang	4.000.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	-		6.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila														
			Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila				2 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	-		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila														
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila				36 Orang	600.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	-		350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pembinaan Pendidikan Politik di Wilayah Kutai Timur	-			undefined %	1.606.782.000,00						-	2.150.000.000,00	

RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[MENINGKATNYA ETIKA DAN BUDAYA POLITIK]	Persentase pembinaan pendidikan politik di wilayah Kutai Timur	100	72	11.20	28	1.606.782.000,00	-	-	-	-	-	-	2.150.000.000,00	-
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-			11 Dokumen	1.606.782.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	-	2.150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				11 Dokumen	1.553.152.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		1.900.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														

RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				100 Orang	53.630.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan .	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	-		250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	-			100 %	1.200.000.000,00						-	600.000.000,00	
		[MENINGKATNYA KETERTIBAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN]	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	100	128	28	30	1.200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	600.000.000,00	-
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-			1 Dokumen	1.200.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	-	-	600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.2.01.0002		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														

RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				6 Dokumen	1.150.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	-		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				30 Orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	-		500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Presentase ASN dan Forum yang dapat Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang Bersih dari Narkoba	-			27 %	0,00						-	1.000.000.000,00	
		[MENINGKATNYA KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT]	Persentase ASN dan Forum yang mendapatkan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang bersih dari narkoba	100	60,28	2,45	27,00	0,00	-	-	-	-	-	-	1.000.000.000,00	-

RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-			1 Dokumen	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	-	1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05.2.01.0002		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	-	1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Konflik Sara Cakupan Penanganan Konflik Sosial di wilayah Kutai Timur	-			0 Kasus 100 %	1.174.000.000,00						-	5.750.000.000,00	
		[PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL]	Jumlah Konflik Sosial Persentase penanganan konflik sosial	0 100	0 100	0 100	0 100	1.174.000.000,00	-	-	-	-	-	-	5.750.000.000,00	-

RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kowaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-			1 Dokumen	1,174.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	-	5.750.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.0002		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		1.700.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.0005		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				2 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		750.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.0006		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota														

RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	74.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		3.300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			J U M L A H					16.430.890.113,00							30.547.905.691,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2025-2029 yang diimplementasikan dalam rencana tahunan, dengan berlandaskan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renja Tahun 2026 sebagai dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2026.

Dalam rangka menjamin terlaksannya kegiatan-kegiatan tersebut, serta terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut.

1. Seluruh aparaturnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2026 dengan efektif dan efisien.
2. Renja tahun 2026 sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran tahun 2026, dimana renja tahun 2026 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisien pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib melakukan pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan renja tahun 2026 sesuai dengan TUPOKSI masing-masing bidang dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala.

4. Tatacara penyusunan renja tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencan Kerja Pemerintah Daerah.

Sangatta, 2025

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kutai Timur

Kepala Badan,



Tejo Yuwono, S.Pd

NIP.197309162000120002